

Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung

Silviana Dewi¹, Atik Rochaeni², Dadan Kurnia³

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan UNJANI, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

^{2,3} Magister Ilmu Pemerintahan UNJANI, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

Email: silvianadewi.r@gmail.com

Abstract: *One of the efforts by the Bandung City Government to alleviate poverty is through the Regional Innovation and Empowerment Development Program (PIPPK). This program aims to promote equitable development in neighborhood units (RW), PKK groups, Karang Taruna, and Community Empowerment Institutions. In practice, the budget absorption in Arcamanik District has reached 85.02% overall. Preliminary observations indicate that the implementation of PIPPK in Arcamanik District is not yet optimal. The aim of this research is to analyze the implementation of PIPPK policies, the challenges faced, and the efforts made by Arcamanik District. The study uses Thomas B. Smith's policy implementation theory, which includes: 1) Legal Framework; 2) Implementing Organization; 3) Target Groups; and 4) Environmental Factors. The research employs a descriptive qualitative design suitable for the issues to be discussed, as well as the local context in which the study is conducted. Data collection is carried out through interviews, document analysis, and observations, all of which are recorded in field notes. The implementation of the Regional Innovation and Empowerment Development Program (PIPPK) in Arcamanik District faces significant challenges in legal understanding, organizational coordination, target group identification, and environmental conditions. The Arcamanik District Government has taken steps such as training, socialization, and improving coordination to address these challenges. However, ongoing evaluation and monitoring are necessary to ensure the program's maximum benefit and achievement of its goals.*

Keywords: *PIPPK, implementation, policy, Arcamanik, group*

Abstrak : Salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Program ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah tingkat RW, lingkup PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kenyataan di lapangan penyerapan anggaran Kecamatan Arcamanik secara keseluruhan sebesar 85,02%, Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Arcamanik belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan PIPPK, hambatan dan upaya yang dilakukan Kecamatan Arcamanik. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Thomas B. Smith yaitu: 1) Landasan Hukum; 2) Organisasi yang Menjalankan; 3) Kelompok yang Ditargetkan; dan 4) Faktor-Faktor Lingkungan. Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, situasi dan kondisi dari lokal di mana penelitian ini dilakukan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi, yang semuanya tercatat dalam catatan lapangan. Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Arcamanik menghadapi hambatan signifikan dalam pemahaman hukum, koordinasi organisasi, identifikasi kelompok sasaran, serta tantangan lingkungan. Pemerintah Kecamatan Arcamanik telah mengambil langkah-langkah seperti pelatihan, sosialisasi, dan perbaikan koordinasi untuk mengatasi hambatan ini. Namun, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan manfaat maksimal dan pencapaian tujuan program.

Kata kunci: PIPPK, implementasi, kebijakan, Arcamanik, kelompok

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah langkah pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Pada intinya, pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ini, di mana masyarakat bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi sumber daya yang kualitas dan kemampuannya terus ditingkatkan. Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Program ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah tingkat RW, serta pemberdayaan di lingkup PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). PIPPK mengusung konsep pemberdayaan, sehingga pengelolaan anggaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program ini mulai dijalankan pada tahun 2015, dengan alokasi dana sebesar Rp. 238 Miliar yang disalurkan merata ke lebih dari 1560 RW di Kota Bandung, di mana setiap RW menerima Rp. 100 juta per tahun. Dasar hukum pelaksanaan PIPPK mencakup Peraturan Walikota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan PIPPK, serta Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya. Tujuan PIPPK adalah memastikan komitmen dan konsistensi dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di kelurahan melalui pendekatan inovatif, desentralisasi, dan kolaborasi, yang didukung oleh sistem pendampingan, pengawasan, dan pengendalian yang efektif.

Salah satu Kecamatan di Kota Bandung yang menerima kucuran dana PIPPK adalah Kecamatan Arcamanik.

Menurut pemaparan Camat Arcamanik pada bulan November 2022, realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Arcamanik mencapai 85,02% yang pencapaiannya mencakup PIPPK RW 91,44%, PIPPK PKK 83,86%, PIPPK Karta 68,51% dan PIPPK LPM 80,52%. Sedangkan realisasi per Kelurahan pencapaian tersebut masing-masing adalah Sukamiskin 97,60%, Bina Harapan 80,47%, Cisaranten Kulon 95,01% dan Cisaranten Endah 48,96%. Penyerapan anggaran menjadi salah satu tolok ukur dalam keberhasilan pelaksanaan PIPPK ini. Meskipun penyerapan anggaran secara keseluruhan sebesar 85,02%, Masih ada satu satu kelurahan yang penyerapan anggarannya kurang dari 50%, yaitu Kelurahan Cisaranten Endah sebesar 48,96%. Sehingga pelaksanaan PIPPK khususnya di Kelurahan Cisaranten Endah berdasarkan penyerapan

anggaranannya dapat dikatakan belum terealisasi sesuai target. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara terhadap 3 informan yaitu Warga Arcamanik, LPM Arcamanik dan Karang Taruna Arcamanik, peneliti menemukan indikasi bahwa pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Arcamanik belum berjalan optimal. Hasil wawancara keseluruhan menunjukkan bahwa: 1) Persepsi masyarakat yang menyamakan PIPPK dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebelumnya sebagai hibah tanpa pertanggungjawaban; 2) Kurangnya pemahaman anggota forum BKM terhadap peran dan tugas mereka; 3) Minimnya media informasi sebagai sarana sosialisasi, menyebabkan beberapa RW tidak rutin melaporkan kegiatan kepada masyarakat dan pemerintah; dan 4) Kurangnya tenaga pendamping, terutama di tingkat RW, yang menyebabkan kekhawatiran bahwa pelaksanaan PIPPK di beberapa RW mungkin tidak tepat sasaran.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai proses pelaksanaan program ini di lapangan. Kajian ini mencakup identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala-kendala yang muncul selama pelaksanaan. Selain itu, diperlukan juga analisis terhadap berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kecamatan Arcamanik dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, guna memastikan tujuan program dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2. METODE

Dalam implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, penelitian ini akan mengacu pada teori Thomas B. Smith yang dijelaskan oleh Santoso (1998:8). Menurut teori ini, pelaksanaan kebijakan melibatkan empat elemen kunci, yaitu: 1) Landasan Hukum (The Idealized Policy); 2) Organisasi yang Menjalankan (Implementing Organization); 3) Kelompok yang Ditargetkan (Target Groups); dan 4) Faktor-Faktor Lingkungan (The Environmental Factors). Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data valid yang dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Sugiyono menjelaskan juga bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, dengan instrumen adalah orang, yaitu peneliti itu sendiri". Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka peneliti menetapkan untuk menggunakan

metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi.

Metode pengambilan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dengan 4 (empat) pihak yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program tersebut. Untuk memastikan validitas data dalam penelitian kualitatif, digunakan empat kriteria utama yaitu kepercayaan (kredibilitas), keteralihan (transferabilitas), kebergantungan (dependabilitas), dan kepastian (konfirmasiabilitas) (Moleong, 2007). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencapai validitas tersebut adalah triangulasi data. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan antara lain mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan dan mengajukan pertanyaan pada beberapa sumber data (informan). Sesuai dengan tujuan penelitian, terdapat tiga kategori pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan yaitu yang pertama terkait bagaimana pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Arcamanik, yang kedua terkait apa saja hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Arcamanik dan yang terakhir apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Arcamanik dalam mengatasi hambatan tersebut.

Selain itu, untuk mencapai keabsahan penelitian, jumlah dan jenis pertanyaan dibagi dua berdasarkan informan, yaitu pertanyaan untuk informan dari internal dan eksternal. Informan internal pada penelitian ini adalah informan dari internal yaitu Camat Arcamanik dan Fasilitator. Sementara itu, informan eksternal yaitu Ketua Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja). Penelitian ini menggunakan wawancara dengan petunjuk umum wawancara terbuka, dimana penelitian ini menggunakan petunjuk umum panduan wawancara berdasarkan teori pelaksanaan kebijakan dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan jawaban dari responden. Proses Penelitian dengan cara merekam semua hasil wawancara, yang kemudian diringkas selanjutnya menggolongkan suatu pola yang lebih luas sehingga hasil wawancara tersebut lebih dapat mudah dipahami. Kemudian data disajikan dengan bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Penelitian ini berorientasi pada perspektif etik dan emik untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan inisiatif strategis yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi sumber

daya lokal. Program ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lurah, serta organisasi masyarakat seperti Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. PIPPK bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dan mempercepat penyediaan infrastruktur dasar yang mendesak.

Program ini dilandasi oleh Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 15 Tahun 2020, yang memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaannya. PIPPK menekankan pendekatan inklusif dan partisipatif, dengan tujuan utama: 1) melibatkan masyarakat dalam semua tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi; 2) memberdayakan masyarakat dan organisasi lokal melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya; 3) mengoptimalkan potensi lokal untuk pembangunan berkelanjutan; dan 4) mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Implementasi PIPPK di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung yang meliputi empat kelurahan (Sukamiskin, Cisaranten Kulon, Cisaranten Binaharapan, dan Cisaranten Endah), menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan perhatian. Pada indikator Landasan Hukum (*The Idealized Policy*), meskipun PERWALI memberikan panduan, penyesuaian di tingkat lokal masih diperlukan agar lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik setiap kelurahan. Koordinasi antar-organisasi yang terlibat, seperti RW, RT, PKK, Karang Taruna, dan LPM, menjadi tantangan pada indikator Organisasi yang Menjalankan (*Implementing Organization*), terutama dalam hal distribusi peran dan tanggung jawab yang jelas untuk menghindari tumpang tindih serta memastikan efektivitas pelaksanaan program. Indikator Kelompok yang Ditargetkan (*Target Groups*) tantangan muncul dalam memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang kurang terjangkau, dapat terlibat aktif dan merasakan manfaat program. Hambatan ini memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, agar kebijakan dan kegiatan program sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Di sisi lain, Faktor-Faktor Lingkungan (*The Environmental Factors*) seperti kondisi sosial-ekonomi dan budaya setempat turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan PIPPK. Faktor eksternal ini menuntut kebijakan yang responsif dan fleksibel, serta adaptasi yang lebih baik di tingkat lokal untuk mengatasi perbedaan kebutuhan dan dinamika sosial di masing-masing kelurahan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, PIPPK di Kecamatan Arcamanik telah menunjukkan beberapa hasil positif, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kapasitas organisasi lokal. Peningkatan infrastruktur dasar di beberapa wilayah juga

menjadi indikator keberhasilan program ini, menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan partisipatif dapat menjadi kunci dalam mendorong pembangunan di tingkat kewilayahan. Untuk ke depannya, upaya yang lebih besar diperlukan dalam meningkatkan koordinasi antar-pemangku kepentingan, memperkuat kapasitas masyarakat lokal, dan memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi agar tujuan PIPPK dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Landasan Hukum (*The Idealized Policy*)

Landasan hukum dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan dasar penting yang memandu implementasi program di lapangan. Landasan hukum ini biasanya terdiri dari peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau kebijakan lain yang menjadi acuan bagi para pelaksana. Dalam konteks PIPPK di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Peraturan Walikota menjadi pedoman utama bagi para pelaksana program. Namun, beberapa kendala muncul terkait dengan interpretasi dan pemahaman terhadap peraturan tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini telah memberikan kerangka kerja yang jelas, masih terdapat perbedaan interpretasi di antara para pemangku kepentingan, yang menunjukkan adanya ketidakpastian dalam implementasi di lapangan. Hal ini sering kali tidak sejalan dengan kondisi lokal, sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang mendasari program juga masih terbatas, yang mengindikasikan perlunya sosialisasi lebih efektif dari pihak pemerintah setempat untuk memastikan pemahaman dan partisipasi yang lebih baik dari masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang lebih mendalam dan penyampaian informasi yang lebih jelas terkait regulasi program masih menjadi kebutuhan yang mendesak. Perubahan regulasi yang sering terjadi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Kendala utama dalam implementasi PIPPK di Kecamatan Arcamanik berkaitan dengan pemahaman dan penerapan landasan hukum yang menjadi acuan. Kendala ini terjadi karena adanya perbedaan interpretasi serta perubahan peraturan yang seringkali tidak disertai dengan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi program, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mensosialisasikan peraturan, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, dan menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini juga termasuk upaya untuk melakukan pelatihan rutin kepada staf dan masyarakat, serta kolaborasi dengan dinas terkait untuk memperjelas dan menyempurnakan peraturan yang ada.

Pemerintah Kecamatan Arcamanik telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap landasan hukum dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi rutin. Pendekatan ini

mencakup konsultasi dengan pihak terkait dan pembuatan panduan praktis untuk mengurangi kesalahpahaman mengenai regulasi. Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan upaya sosialisasi melalui pertemuan dan diskusi terbuka untuk memastikan bahwa masyarakat memahami aturan yang berlaku. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kebingungan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperbaiki penyerapan anggaran serta efektivitas pelaksanaan program PIPPK secara keseluruhan.

Dengan demikian, meskipun telah ada beberapa langkah yang diambil untuk mengatasi kendala yang ada, tetap diperlukan perbaikan lebih lanjut dalam hal komunikasi, dokumentasi, dan penyesuaian regulasi untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Organisasi Yang Menjalankan (*Implementing Organization*)

Organisasi pelaksana merupakan entitas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan atau program, dengan peran penting dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian sumber daya guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Arcamanik, pelaksanaan program ini telah dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan, ditemukan bahwa koordinasi yang efektif antara tim dan lembaga yang terkait dalam pelaksanaan PIPPK masih memerlukan perbaikan. Meskipun sudah ada tim khusus yang dibentuk untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar, terdapat kebutuhan akan peningkatan dalam hal kerjasama lintas lembaga. Koordinasi yang kurang solid seringkali mengakibatkan kesenjangan informasi dan perbedaan prioritas, yang pada gilirannya mempengaruhi efisiensi dan efektivitas program. Penting untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat, termasuk melalui sosialisasi yang lebih intensif dan penggunaan teknologi untuk mempermudah alur informasi.

Di sisi lain, kompleksitas birokrasi juga diidentifikasi sebagai salah satu hambatan utama dalam implementasi program di Kecamatan Arcamanik. Proses pengambilan keputusan yang memakan waktu dan kurang responsif terhadap situasi lapangan dapat memperlambat pelaksanaan kegiatan. Hal ini menimbulkan tantangan tambahan dalam mencapai target program dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menyederhanakan alur birokrasi dan meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan dianggap sangat penting. Selain itu, ada kebutuhan untuk membuat mekanisme

komunikasi yang lebih efisien, baik di antara anggota tim pelaksana maupun dengan masyarakat, agar dapat menanggapi situasi di lapangan dengan lebih cepat dan tepat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun responsivitas organisasi pelaksana sudah cukup baik, perbaikan dalam koordinasi antar lembaga dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif masih diperlukan. Hal ini mencakup perlunya pelibatan semua pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kebijakan pemerintah kecamatan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Dengan adanya sistem umpan balik yang lebih baik, misalnya melalui pertemuan rutin dengan lembaga-lembaga terkait, dapat diidentifikasi berbagai masalah yang muncul selama pelaksanaan program sehingga penyesuaian dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efektif.

Di tingkat masyarakat ditemukan pula bahwa komunikasi yang jelas dan tepat waktu menjadi kunci penting untuk memastikan partisipasi yang aktif dan dukungan terhadap program PIPPK. Saat ini, masih terdapat kesenjangan informasi di antara pihak-pihak yang terlibat, terutama antara kelompok kerja (Pokja) dan masyarakat. Keputusan-keputusan sering kali diambil tanpa koordinasi yang memadai dengan kelompok kerja atau masyarakat, yang menyebabkan kurangnya informasi yang diterima oleh mereka di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas komunikasi bagi anggota Pokja dan pelaksana program lainnya untuk mengatasi masalah ini.

Kondisi di Kecamatan Arcamanik mencerminkan adanya dinamika yang kompleks dalam pelaksanaan program pembangunan. Meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki koordinasi dan meningkatkan komunikasi, pelaksanaan PIPPK masih dihadapkan pada tantangan dalam hal sinergi antar lembaga, kelancaran alur birokrasi, dan keterlibatan masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, komunikasi yang lebih terbuka, serta penyederhanaan proses administratif, diharapkan pelaksanaan program ini dapat lebih efektif dan efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan lebih optimal.

Peningkatan kerjasama lintas lembaga, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan komunikasi dengan masyarakat akan menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Arcamanik. Melalui upaya ini, diharapkan tantangan yang ada dapat diatasi, efektivitas program dapat ditingkatkan, dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat setempat dapat dicapai.

Kelompok yang Ditargetkan (*Target Groups*)

Target group adalah kelompok masyarakat atau individu yang menjadi sasaran dari sebuah program atau kebijakan. Kelompok ini ditentukan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan kondisi yang relevan dengan tujuan program atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam konteks Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Arcamanik, target group melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang dianggap memerlukan intervensi atau dukungan. Target group tersebut meliputi kelompok masyarakat rentan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok penerima manfaat langsung, serta masyarakat umum yang merasakan dampak tidak langsung dari program.

Implementasi kebijakan PIPPK di Kecamatan Arcamanik tidak lepas dari berbagai tantangan terkait penentuan dan keterlibatan target group. Observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa meskipun target group dalam program ini telah ditentukan dengan baik, terdapat hambatan signifikan dalam menjangkau dan melibatkan mereka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi dan akses yang seringkali menghambat upaya untuk memastikan bahwa semua kelompok yang membutuhkan terlibat secara efektif.

Hasil temuan di Kecamatan Arcamanik menunjukkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah ketidaktepatan data yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok sasaran. Data yang kurang akurat menyebabkan beberapa kelompok prioritas tidak teridentifikasi dengan baik, mengakibatkan pelaksanaan program tidak sepenuhnya mencapai sasaran yang diinginkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem informasi dan pemetaan kelompok sasaran, yang berdampak pada efektivitas program secara keseluruhan.

Selain itu, terdapat kesulitan dalam memastikan keterlibatan semua kelompok sasaran yang ditetapkan. Beberapa kelompok masyarakat merasa tidak terwakili dalam program ini, yang berujung pada rendahnya partisipasi mereka. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam proses inklusi dan komunikasi yang efektif. Misalnya, sosialisasi yang dilakukan di tingkat kecamatan belum sepenuhnya menjangkau semua kelompok, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau yang memiliki akses terbatas. Akibatnya, beberapa kelompok masyarakat, seperti perempuan dan kelompok rentan lainnya, masih merasa belum mendapatkan perhatian yang cukup.

Lebih lanjut, penetapan prioritas kelompok sasaran sering kali menghadapi tantangan karena adanya kebutuhan yang berbeda-beda di lapangan. Berbagai kelompok merasa terabaikan

atau tidak mendapatkan perhatian yang layak, yang menunjukkan perlunya strategi prioritas yang lebih baik dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran.

Faktor-Faktor Lingkungan (*The Environmental Factors*)

Implementasi kebijakan atau program sering kali dipengaruhi oleh berbagai kondisi eksternal, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi, yang dapat menjadi peluang atau tantangan. Dalam konteks Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), beberapa faktor lingkungan eksternal di Kecamatan Arcamanik turut berperan penting dalam mempengaruhi keberhasilan program ini.

Pertama, dari sisi sosial, terdapat variabilitas tingkat partisipasi masyarakat, solidaritas komunitas, dan kesadaran mengenai pentingnya pembangunan wilayah. Masyarakat Arcamanik, yang terkenal dengan keberagaman latar belakang sosial, sering kali memiliki tingkat partisipasi yang berbeda-beda. Di beberapa wilayah, kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan cukup tinggi, sementara di wilayah lain partisipasi masih rendah. Tingkat partisipasi ini menjadi kunci penting dalam keberhasilan PIPPK. Ketika masyarakat aktif berpartisipasi, program dapat berjalan dengan lancar; sebaliknya, jika partisipasi rendah, program sering kali menemui hambatan.

Dari perspektif ekonomi, faktor seperti anggaran pemerintah daerah, alokasi dana program, dan kondisi ekonomi setempat juga menjadi determinan penting. Ketersediaan anggaran yang memadai sangat menentukan kelancaran program. Pada saat kondisi ekonomi stabil dan alokasi dana mencukupi, program dapat dilaksanakan lebih efektif. Namun, Kecamatan Arcamanik, yang memiliki kondisi ekonomi beragam, menghadapi tantangan tersendiri, terutama di wilayah-wilayah dengan kondisi ekonomi kurang stabil atau terbatasnya sumber daya keuangan. Tantangan ini sering kali mempengaruhi implementasi program, terutama dalam hal distribusi bantuan atau pelaksanaan kegiatan.

Dari aspek politik, dukungan dari pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, lembaga legislatif, maupun tokoh masyarakat, menjadi elemen penting yang memengaruhi implementasi program. Dukungan politik yang kuat memungkinkan program berjalan dengan lebih baik, tetapi ketika ada perubahan kebijakan atau instabilitas politik, program bisa terganggu. Di Arcamanik, dinamika politik lokal cukup signifikan, dengan adanya berbagai kepentingan dari kelompok berbeda yang mempengaruhi pelaksanaan program.

Teknologi juga memainkan peran penting, terutama dalam hal akses dan pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun beberapa wilayah di Kecamatan Arcamanik sudah cukup maju dalam hal akses internet dan teknologi digital, masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Hal ini bisa menghambat efektivitas komunikasi dan penyebaran informasi terkait

program. Masyarakat yang kurang terbiasa atau minim akses terhadap teknologi juga bisa menjadi tantangan dalam pelaksanaan PIPPK.

Aspek budaya juga memberikan pengaruh yang signifikan. Di Kecamatan Arcamanik, budaya gotong royong dan kepedulian sosial masih cukup kuat di beberapa komunitas. Namun, di sisi lain, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang cenderung kurang terbuka atau skeptis terhadap program pemerintah. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih sensitif dan adaptif dalam melibatkan masyarakat secara aktif.

Kondisi geografis dan infrastruktur di Kecamatan Arcamanik juga menjadi tantangan nyata. Beberapa wilayah di Arcamanik memiliki infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan rusak atau minimnya fasilitas publik, yang menghambat pelaksanaan program. Wilayah-wilayah yang sulit dijangkau sering kali menghadapi kendala distribusi bantuan dan pelaksanaan kegiatan, terutama ketika cuaca buruk seperti hujan deras atau banjir memperparah kondisi aksesibilitas.

Berdasarkan wawancara dengan para pemangku kepentingan di Kecamatan Arcamanik, seperti camat, fasilitator, ketua LPM, dan ketua Pokja, teridentifikasi bahwa berbagai faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi pelaksanaan PIPPK. Di satu sisi, ada peluang yang bisa dimanfaatkan dengan meningkatkan infrastruktur dan mengadaptasi program sesuai dengan kondisi lokal. Di sisi lain, tantangan seperti keraguan masyarakat terhadap manfaat program, resistensi dari sebagian warga, dan keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur memerlukan strategi yang lebih inklusif dan adaptif.

Pemerintah Kecamatan Arcamanik telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Misalnya, peningkatan infrastruktur dasar di wilayah yang sulit diakses, pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat, serta pelibatan organisasi lokal untuk menjembatani pemerintah dan masyarakat. Selain itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkelanjutan untuk memastikan program dapat berjalan efektif sesuai dengan dinamika kondisi di lapangan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menyesuaikan diri dengan kondisi lokal yang berubah-ubah guna meningkatkan efektivitas dan keberhasilan jangka panjang dari PIPPK di Kecamatan Arcamanik.

Secara keseluruhan, berbagai upaya yang dilakukan, termasuk meningkatkan infrastruktur, membangun komunikasi yang lebih baik, dan melibatkan masyarakat secara aktif, adalah langkah penting untuk mengatasi tantangan lingkungan yang ada. Keberhasilan program ini akan bergantung pada kemampuan semua pihak untuk beradaptasi dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

4. KESIMPULAN

Terdapat tantangan terkait pemahaman dan penerapan landasan hukum program. Peraturan yang sering berubah dan dianggap tidak jelas sering menyebabkan interpretasi yang berbeda di antara pihak-pihak terkait. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas program, karena sosialisasi yang tidak memadai dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan dapat mengarah pada resistensi dan partisipasi yang rendah. Kebijakan yang kurang fleksibel untuk diterapkan di lapangan juga menghambat pelaksanaan program; 2) Kendala utama dalam organisasi pelaksana adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak. Kesenjangan informasi dan perbedaan prioritas menghambat pelaksanaan program secara efisien. Proses birokrasi yang panjang dan rumit juga berkontribusi pada lambatnya pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan kelompok kerja (Pokja) yang tidak optimal dalam pengambilan keputusan menambah tantangan dalam menciptakan sinergi di lapangan; 3) Kesulitan dalam mengidentifikasi dan melibatkan kelompok sasaran menjadi hambatan signifikan. Data yang tidak akurat mengakibatkan beberapa kelompok prioritas terabaikan. Kurangnya sosialisasi mengenai kelompok sasaran menyebabkan ketidakjelasan di masyarakat, yang berdampak pada rendahnya partisipasi karena merasa tidak terwakili atau belum melihat manfaat langsung dari program; dan 4) Faktor lingkungan mencakup berbagai tantangan seperti kondisi sosial yang beragam, persepsi negatif masyarakat terhadap program, dan tantangan geografis. Infrastruktur yang kurang memadai dan faktor cuaca seperti hujan lebat sering menghambat pelaksanaan kegiatan. Resistensi budaya dan skeptisisme masyarakat juga mempengaruhi tingkat partisipasi dan keberhasilan program.

Dalam upaya mengatasi hambatan terkait landasan hukum, pemerintah telah meningkatkan upaya sosialisasi dan pelatihan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Langkah ini melibatkan penyiapan panduan praktis yang jelas untuk aturan yang berlaku, guna mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepatuhan di lapangan. Sementara itu, dalam aspek organisasi pelaksana, perbaikan koordinasi dilakukan dengan membentuk tim kerja yang lebih terstruktur dan memanfaatkan teknologi untuk memperlancar alur informasi. Sistem umpan balik diperkenalkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah secara efisien, yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat. Untuk memastikan bahwa kelompok sasaran tepat sasaran, pemerintah melakukan pemetaan ulang data masyarakat dan memperbarui informasi mengenai kelompok yang membutuhkan bantuan. Transparansi dalam proses pemilihan kelompok sasaran juga diperkuat, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program ditingkatkan agar kebutuhan mereka dapat terakomodasi dengan baik. Di

sisi faktor lingkungan, pemerintah memfokuskan upayanya pada perbaikan infrastruktur dasar di wilayah yang sulit diakses dan melakukan penyesuaian program agar sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Selain itu, kemitraan dengan organisasi lokal diperkuat untuk membantu menghadapi kendala-kendala lingkungan yang ada, dengan tujuan memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pemerintah Kecamatan Arcamanik menunjukkan komitmen untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan PIPPK dengan menerapkan strategi yang terstruktur dan adaptif. Meskipun telah banyak langkah positif yang dilakukan, penting untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan bahwa program ini memberikan manfaat maksimal dan mencapai tujuan pembangunan serta pemberdayaan yang diharapkan. Langkah-langkah ini mencakup perbaikan dalam pemahaman hukum, peningkatan koordinasi, penargetan kelompok sasaran yang lebih baik, serta penyesuaian terhadap kondisi lingkungan setempat.

DAFTAR PUSAKA

- Arifin, Z. (2018). Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Program PIPPK. *Media Pembangunan*, 15(1), 21-35.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Bandung. (2019). *Peraturan Walikota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. (2020). *Peraturan Walikota Bandung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Quade, E.S. (1984). *Analysis For Public Decisions*. Elsevier Science Publisher. New York.
- Rahmawati, D. (2021). Peran LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia: Studi Implementasi PIPPK di Daerah Perdesaan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 9(1), 112-128.
- Santoso, S. (1998). *Analisis Kebijakan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, B. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Keberhasilan PIPPK di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 12(2), 45-60.
- Suryadi, A. (2019). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kewilayahan Melalui PIPPK*. Pustaka Daerah.
- Wijaya, R. (2021). Tantangan Implementasi Program PIPPK: Studi Kasus di Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 33-47.